



Evaluasi Regulasi PPDB

JOGJA-DPRD Kota Jogja meminta pemerintah mengevaluasi regulasi jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebab masih banyak orang tua yang mengakali sistem zonasi.

Sunartono, Triyo Handoko, Lugas Subarkah
redaksi@harianjogja.com

- ▶ **Suitan menyinggung adanya orang tua yang melakukan cara apa pun termasuk yang tidak benar demi anaknya mendapatkan sekolah yang diinginkan.**
- ▶ **Forpi Jogja menemukan indikasi kecurangan proses PPDB di beberapa SMP.**

Di Kota Jogja, regulasi yang kini berlaku masih memungkinkan orang tua murid untuk mengakali sistem zonasi wilayah dengan "membonceng" di kartu keluarga (KK) orang lain demi memuluskan rencana calon murid agar diterima di sekolah tertentu. Padahal status tempat tinggalnya cukup jauh dari lokasi sekolah.

"Yang memungkinkan ke depan diubah Perwal PPDB untuk jarak waktu perpindahan KK ditingkatkan lebih dari satu tahun, serta kuota zona jarak semakin diperkecil untuk mengurangi potensi mobilisasi perpindahan," kata Sekretaris Komisi D DPRD Kota Jogja, Ali Fahmi, Selasa (14/6).

Menurutnya, dengan perubahan aturan sedemikian rupa disinyalir akan memperkecil potensi fenomena menumpang KK oleh calon murid saat proses PPDB. Di sisi lain hal itu juga akan mencegah fenomena perpindahan KK oleh orang tua murid secara massal jelang proses PPDB. "Dan juga ke depan hendaknya lebih mengedepankan zona mutu berdasarkan nilai ASPD dari calon murid," ungkap Fahmi.

Evaluasi Regulasi...

Forum Pemantau Independen (Forpi) Jogja menemukan indikasi kecurangan proses PPDB di beberapa SMP di Kota Pelajar. Indikasi kecurangan berupa jara rumah calon peserta didik dengan sekolah, dan kejanggalan proses pindah penduduk yang dilakukan calon peserta didik.

"Kami menemukan di KK tertulis dikeluarkan pada 27 Desember 2021. Seharusnya menurut aturan KK dikeluarkan paling singkat satu tahun untuk PPDB," jelas anggota Forpi Baharudin Kamba, Selasa.

Sebelumnya, Forpi mengunjungi SMPN 5, SMPN 8, dan SMPN 10 Jogja. Dalam kunjungan tersebut Forpi mengambil sampel dokumen siswa yang sudah dinyatakan lolos sementara. Baharudin menjelaskan temuan lainnya adalah jarak terdekat siswa yang sudah dinyatakan lolos sementara hanya 13 meter dari sekolah.

"Ini kami temukan di SMPN 8 Jogja, untuk itu kami minta Disdukcapil menelusuri lebih lanjut apakah benar domisilinya di situ," ujarnya.

Di SMPN 5 Jogja, kata Baharudin, ada peserta didik yang sudah dinyatakan lolos sementara jarak rumahnya 500 meter dengan sekolah. "Padahal nilai ujian mereka tergolong rendah, bahkan ada yang total nilainya hanya 80," katanya.

Untuk itu Baharudin mengingatkan orang tua peserta didik untuk tidak memaksakan memasukkan anaknya ke sekolah favorit.

Kepada Forpi, SMPN 8 Jogja mengaku akan memverifikasi faktual domisili pendaftar dengan mengunjungi rumah calon

peserta didik. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun lalu dan akan dilakukan tahun ini. "Temuan mereka [SMPN 8 Jogja] memang ada yang setelah dicek ternyata tempat tinggalnya di Gunungkidul dan Kulonprogo," jelasnya.

Paksakan Diri

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, meminta para orang tua yang mendampingi anak mencari sekolah melalui PPDB 2022 lebih bijak.

Orang tua diminta memberikan dorongan kesadaran mental anak agar tidak harus memilih sekolah favorit.

Sultan menyinggung soal adanya orang tua yang melakukan apa pun demi anaknya mendapatkan sekolah yang diinginkan. Bahkan beberapa tahun sebelumnya termasuk menyewa rumah di dekat sekolah agar masuk ke zonasi.

Akan tetapi kasus tersebut tidak terjadi lagi karena sudah dilakukan antisipasi sebelum Pergub PPDB diterbitkan.

"Itu kasus-kasus yang dulu terjadi, karena ingin diterima di sekolah A, dia menyewa rumah [pindah KK] di dekat sekolah biar diterima [di sistem zonasi]. Begitu sudah diterima [di sekolah A], kembali ke rumah asalnya. Itu memang pernah terjadi dan sudah kami pikirkan antisipasinya sebelum keputusan [Pergub PPDB] itu diterbitkan," kata Sultan di sela-sela kunjungan ke PD Tarumartani, Selasa.

Sultan menambahkan perlu ada kesepakatan atau kebijaksanaan guru dan orang tua agar mental anak tidak turun ketika diterima di sekolah yang tidak sesuai keinginan. Namun, sebaliknya,

anak diberikan pemahaman bahwa jangan sampai orang yang pandai hanya berkumpul di satu sekolah saja. Jadi meskipun anak nilainya bagus tidak harus di sekolah favorit tetapi bisa di sekolah lain, sehingga memiliki potensi menjadi juara kelas. Berbeda dengan di sekolah favorit kompetitor lebih banyak. Menurut Sultan, ini bisa menjadi strategi agar anak bisa didorong dan memperbesar keyakinan mentalnya untuk belajar.

"Kalau yang pandai juga ke sekolah lain yang mungkin rata-rata [ibaratnya nilai] 7 dan dia mungkin mendapatkan [nilai] 8 berarti dia bisa juara kelas. Tetapi kalau yang pintar semua jadi satu, juara kelas mungkin bisa jadi *problem* sendiri bagi sekolah untuk melakukan *branding*. Ini kondisi *real* yang terjadi di publik," ucapnya.

Jarak memang sering menjadi persoalan saat sistem zonasi diterapkan di PPDB selama beberapa tahun terakhir. Namun, kata Sultan, dengan telah dilaksanakan setiap tahun sehingga persoalan itu bisa diatasi. Di wilayah DIY seperti Kota Jogja termasuk luasnya kecil sehingga saat dahulu mendirikan sekolah tidak pernah mempertimbangkan soal jarak. Melainkan berdasarkan tanah yang kosong kemudian dibangun sekolah. Padahal soal jarak saat ini menjadi pertimbangan utama dalam PPDB.

Tanpa Kendala

Sementara itu, Wakil Kepala SMPN 1 Sewon, Bantul, Hardiyanto, menjelaskan untuk pelaksanaan PPDB sejauh ini belum ada kendala berarti. Sosialisasi PPDB menurutnya

sudah dilakukan dengan baik di SD masing-masing pendaftar sehingga tidak banyak yang kebingungan. "Hanya satu-dua [bertanya] karena di SD sudah dijelaskan detail. Karena guru SD biasanya bertanggung jawab termasuk daftar *online*-nya," katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Sri Adi Marsanto, tidak menampik meski sudah dilakukan sosialisasi tapi belum semua informasi bisa sampai ke masyarakat. Sehingga sebagian masyarakat memilih untuk datang langsung ke posko. "Kalau saya amati sampai hari ini [kemarin] yang datang ke dinas juga tidak terlalu banyak untuk bertanya. Alhamdulillah sampai hari ini baik dan lancar," ujarnya.

Kepala Bidang SMP, Dinas Pendidikan Gunungkidul, Tijan mengatakan, sudah mulai menyiapkan pelaksanaan PPDB secara *online*, meski pendaftaran baru dibuka 20-22 Juni nanti. Adapun persiapan dengan melakukan kesiapan *server* untuk pendaftaran agar berjalan dengan lancar. "Jalurnya masih memakai zonasi sebesar 50 persen, perpindahan orang tua lima persen, prestasi 30 persen dan afirmasi 25 persen," kata Tijan.

Kepala Disdikpora Kulonprogo, Arif Prastowo, menyampaikan sejauh ini pelaksanaan PPDB berjalan lancar. "Sampai hari ini [kemarin] tidak kami temukan dan kami belum ada laporan berkaitan dengan hal itu. Sejauh ini, dua hari ini masih tertib, sesuai dengan ketentuan," ujarnya. (David Kurniawan, Anisatul Umah, Yusuf Leon, & Catur Dwi Janati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005